



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TATANG BARLIAN**
2. Jabatan : **SENIOR VICE PRESIDENT**
3. NHK : **186145**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.730.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/200 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 610.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/200 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/100 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/30 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 333.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU AYL A MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 64.000.000
2. MOBIL, DATSUN GO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
5. MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000



6. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
140.000.000
7. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 66.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 420.100.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.549.100.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.549.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.